

**PERUBAHAN SOSIAL
&
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**



Dr. Praptining Sukowati, SH. MSi

**PERUBAHAN SOSIAL
&
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Dr. Praptining Sukowati, SH. MSi

Diterbitkan oleh :



**Bayumedia Publishing
Anggota IKAPI**

Jl. Bukit Barisan No 23, Malang
Telp/Fax : (0341) 56 83 23
e-mail : bayumedia@yahoo.com

Cetakan Pertama, juni 2011
16,5 x 24, xii + 236 Halaman

ISBN : 978-602-9136-61-6

Setting Layout & Editor : Vicky Nelwan
Desain Cover : Mahendra DHS.

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi
buku kedalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis,
termasuk fotocopy, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya,
tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat
(1), (2), dan (6)



Kata Pengantar

Kepala Bidang WASDAL Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Disadari sepenuhnya bahwa adanya perubahan sosial yang berdampak pada perubahan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, telah berakibat pada terjadinya perubahan ekosistem dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan seharusnya tidak hanya mendasarkan pada *profit oriented* semata, namun juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensinergikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam dalam menopang pelaksanaannya.

Buku "***Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan***" yang ditulis oleh saudari DR Praptining Sukowati, SH, MSi ini diluncurkan pada waktu yang sangat tepat. Mengingat kondisi yang terjadi saat ini, dimana pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih.

Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya diharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia ternyata juga harus dibayar amat mahal, karena dampak negatifnya terhadap kelestarian lingkungan.

Pertumbuhan industri, sebagai hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti telah membuat erosi tanah dan pencemaran limbah pada tanah pertanian yang menyebabkan terjadinya proses penggaraman (*solinisasi*) atau penggurunan (*desertifikasi*) pada lahan produktif. Supaya dampak negatif yang ditimbulkan tidak semakin memburuk, maka perlu dilakukan berbagai langkah pencegahan, di antaranya melalui penegakan hukum.

Untuk itu pemerintah harus semaksimal mungkin melaksanakan tugas pengawasan, yang dilakukan secara benar, cermat, dan bertanggung jawab serta tetap memegang teguh etika dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain juga diharapkan agar selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme di bidang teknis pengawasan dan penyidikan tindak pidana lingkungan. Sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan.

Meluasnya berbagai dampak lingkungan akan semakin mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem. Untuk itu maka pembangunan yang berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, dan peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu pembangunan harus berpandangan jauh ke depan yang dirumuskan sebagai visi dan misi pembangunan, dan dapat diimplementasikan ke dalam pembangunan jangka panjang secara ideal yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dimaksud adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, ketrampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.

Berhasil atau tidaknya, sangat tergantung pada strategi kebijakan pembangunan yang dijalankan. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di dalam pengelolaan lingkungan hidup maka dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi dan sosial budaya, serta lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Surabaya, Juni 2011

Kepala Bidang Wasdal Pencemaran Lingkungan,

M. WASENG, ST, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600902 198603 1 013

Kata Pengantar

Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang

Perubahan sosial dan pembangunan merupakan dua bidang kajian yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Apabila dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan, maka kajian ini merupakan salah satu aspek integral atau produk dari perkembangan kehidupan masyarakat yang disebut perubahan sosial. Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial, perubahan tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang makin tajam, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis, dan perubahan dalam tata cara serta alat-alat kegiatan yang makin modern, efisien, dan sebagainya. Perubahan sosial mencakup dua unsur utama yaitu, perubahan yang terjadi kepada birokrasi dan kepada masyarakat umum sebagai kelompok sasaran program sosial dalam periode tertentu. Secara umum, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari dan memahami perubahan sosial dan pembangunan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep perubahan sosial ke dalam bidang atau sektor pembangunan di Indonesia.

Buku dengan judul “***Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan***” yang ditulis saudari DR Praptining Sukowati, SH, MSi ini perlu dibaca, khususnya bagi para dosen, pejabat/aparatur publik ataupun masyarakat umum serta mahasiswa yang sedang studi di *Program Doktor Ilmu Sosial*. Sehingga setelah membaca buku ini diharapkan muncul pemikiran dan gagasan baru terkait dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta proses perubahan sosial yang sedang terjadi. Yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non material.

Adanya fenomena yang terjadi dengan adanya issue *global warming* disertai dengan maraknya globalisasi yaitu suatu keadaan di mana segenap aspek perekonomian (seperti pasokan dan permintaan bahan baku, informasi, transportasi tenaga kerja, keuangan distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran) menyatu secara terintegrasi dan semakin terjadi ketergantungan satu sama lain dengan skala internasional, menjadikan kita semua harus waspada, semakin berpikir, dan bertindak bijak untuk menyikapinya. Dalam pendekatan konflik *Dahrendorf*, dikatakan bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (*interest groups*). Dimana mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (*status quo*), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat. Kiranya buku ini menarik untuk bahan diskusi kita bersama, khususnya dalam rangka menciptakan pembangunan kesejahteraan yang selama ini telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka menyikapi dampak akibat dari globalisasi, seperti dampak terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi, aspek kesehatan, aspek kemiskinan dan aspek lingkungan hidup.

Malang, Juni 2010



Prof. DR. I Made Weni, MS

Kata Pengantar **Rektor Universitas Merdeka Malang**

Selama ini permasalahan kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang luar biasa. Degradasi dan kerusakan lingkungan sulit dihindarkan ketika penduduk masih dililit kemiskinan. Adanya penduduk Indonesia lebih dari 110 juta masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, bahkan menurut UNDP sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara yang bertempat tinggal di Indonesia intensitas pemanfaatannya semakin tinggi karena sebagai satu-satunya tempat bergantung bagi kelangsungan hidup mereka. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Sehingga diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai solusi pemecahannya.

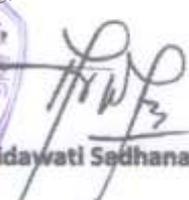
Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik, sehingga selama ini masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat implementasi kebijakan dan pengaturannya. Sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Hal tersebut telah menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi *Stockholm (UN Conference on the Human Environment)* tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dalam konferensi *Stockholm* tersebut membicarakan permasalahan lingkungan dan pemecahannya, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut sejalan dengan keinginan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bertepatan dengan diumumkannya Strategi Pembangunan Internasional bagi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (*The Second UN Development Decade*), menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat

diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini telah mencurahkan perhatian kepada usaha melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang, dengan sinergitas antara kebijakan bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi *Stocholm* yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep pembangunan berkelanjutan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Buku dengan judul “**Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**” yang ditulis saudari DR. Praptining Sukowati, SH, MSi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu dibaca, mengingat adanya tekanan aktifitas sekelompok manusia yang semakin menguat dibanding dengan adanya laju pemulihan sumberdaya alam yang lambat maka akan terjadi degradasi bahkan kerusakan sumberdaya alam yang semakin cepat. Selanjutnya adanya tekanan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya alam tentu juga akan memperlambat pemulihan sumberdaya alam. Sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan yang sinergi dengan pembangunan berkelanjutan, agar peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Malang, Juni 2011

Rektor,

DR. Kridawati Sedhana, MS

Pengantar Penulis

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kuasa dan limpah-Nya kami telah dapat menyelesaikan buku **“Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”**. Dalam pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam system sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan ekstern yang memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial (*Talcott Parsons*), maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori kesenjangan Budaya (*cultural lag*) oleh *William Ogburn*. Sedangkan dalam pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh *Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser*, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran *Talcott Parsons*, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat. Akhirnya tanpa disadari adanya perubahan tersebut menyebabkan pergeseran pembangunan yang mengarah pada *profit oriented* dan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan bukan lagi pada peningkatan kesejahteraan sosial (*Social Welfare*).

Buku **“Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”**, ini berusaha menyampaikan fenomena dan kondisi nyata perubahan sosial dan dampaknya pada pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terpinggirkan dengan kepentingan-kepentingan sosial politik dan ekonomi. Adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sejalan dengan kewenangan yang lebih besar tersebut, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan bisa mampu menggali potensi daerahnya secara optimal untuk meningkatkan taraf kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan hukum *Ronald Cause* (pemenang hadiah

Nobel bidang ekonomi tahun 1991), *di alam semesta tidak ada yang gratis, jika seseorang mengambil sesuatu dari alam (termasuk mengambil manfaat) maka harus diimbangi dengan pemberian kompensasi, agar terjadi keseimbangan neraca aliran energi dan materi. Jika ada seseorang mengambil sesuatu tanpa memberi kompensasi maka ada orang lain yang akan memikul kerugian*”.

Berdasarkan hukum *Ronald Caus* tersebut diatas, maka setiap industri tidak boleh membuang limbah ke media lingkungan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Biaya pengolahan limbah merupakan salah satu kompensasi yang diberikan oleh para pelaku industri yang telah memanfaatkan jasa lingkungan sebagai sarana pembuangan limbah. Implikasi dari hukum *Ronald Cause* adalah merubah pos biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dari biaya eksternal menjadi biaya internal. Sehingga sulit dihindarkan, apabila intensitas tekanan terhadap lingkungan terus menerus terjadi, maka upaya pembangunan berwawasan lingkungan menjadi salah satu cara yang diperlukan agar lingkungan tetap terjaga keberadaannya. Kekeliruan pengelolaan lingkungan akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan hingga tanpa dapat diperbaiki lagi sehingga dalam jangka panjang akan berakibat pada bencana lingkungan.

Malang, Juni 2011

Penulis

Daftar Gambar

Gambar 1	: Aspek Sosial Ekonomi Pada Etnis Cina Masa Dahulu Dan Masa Kini	11
Gambar 2	: <i>Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations</i>	16
Gambar 3	: Model Pembangunan Kesejahteraan	29
Gambar 4	: Hubungan Perubahan Sosial dengan Perubahan Kebudayaan	48
Gambar 5	: Dampak Dinamika dan Perubahan Masyarakat dalam Kumulatif Kemiskinan Perkotaan	54
Gambar 6	: Lima Gaya Menejemen Konflik	123
Gambar 7	: Posisi Pendekatan Transaktif	180
Gambar 8	: Skema Daur Ulang Perilaku Manusia	212

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Kepala Badan Lingkungan Hidup Prop. Jawa Timur	iii
Kata Pengantar Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Unmer Malang.....	v
Pengantar Penulis	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Isi	x
Pendahuluan	1

Bagian Pertama

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

	3
➤ Definisi dan Lingkup Perubahan Sosial	4
➤ Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Kesejahteraan	14
➤ Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan	36

Bagian Kedua

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN

	40
➤ Realitas Pembangunan.....	41
➤ Arah Perubahan Sosial.....	44
➤ Dampak Perubahan Sosial terhadap Pembangunan	47
➤ Dinamika dan Perubahan Masyarakat dalam Pembangunan	51

Bagian Ketiga

UNSUR-UNSUR & TIPE-TIPE PERUBAHAN SOSIAL

	56
➤ Unsur-Unsur Perubahan Sosial	57
➤ Tipe-Tipe Perubahan	67
• Perubahan Peradaban	67
• Perubahan Kebudayaan	68
• Perubahan Sosial Evolusi	69
• Perubahan Revolusi Sosial	71
• Perubahan Sosial Terencana dan Tidak Terencana....	72
• Perubahan Sosial Berpengaruh Kecil dan Besar.....	74
• Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat.....	74

Bagian Keempat	
PENDEKATAN TEORI-TEORI SOSIAL	76
➤ Teori <i>Barrington Moore</i>	77
➤ Teori Perilaku Kolektif.....	79
➤ Teori Klasik	80
➤ Teori Modern.....	90
➤ Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan.....	91
Bagian Kelima	
FAKTOR PENDORONG & PENGHAMBAT PERUBAHAN SOSIAL	99
➤ Faktor Pendorong Proses Perubahan	100
➤ Faktor Penghambat Proses Perubahan	105
Bagian Keenam	
STRATEGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN BERKEADABAN	110
➤ Strategi Pembangunan Gotong Royong	112
➤ Strategi Pembangunan Konflik	117
BAGIAN KETUJUH	
KONSEP PEMBANGUNAN DENGAN ASAS PERTUMBUHAN (<i>GROWTH DEVELOPMENT</i>)	127
➤ Kebijakan Pembangunan dengan Asas Pertumbuhan	128
➤ Pergeseran Makna Pembangunan dalam Asas Pertumbuhan.....	131
➤ Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan	135
➤ Desentralisasi, Demokrasi Lokal dan Pembangunan Daerah.....	138
➤ Konsep Komunikasi Pembangunan.....	143
Bagian Kedelapan	
PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL PERSPEKTIF KRITIS	159
➤ Demokratisasi.....	161
➤ Revolusi Industri.....	168
➤ Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	170
➤ Globalisasi.....	173
➤ <i>Transactive Planning</i>	179
➤ <i>Issue Gender</i>	181

Bagian Kesembilan	
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	185
➤ Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan .	186
➤ Penegakan Hukum Lingkungan	190
➤ Potret Lingkungan Hidup di Daerah	192
➤ Dampak Kebijakan Pembangunan, Perubahan Sosial dan Kerusakan Lingkungan.....	195
➤ Solusi dan Strategi Kebijakan	199
➤ Pendekatan Kearifan Lokal dan Lingkungan.....	207
➤ Pendekatan dalam Pembelajaran Kearifan Lokal.....	213
➤ Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan.....	220
➤ Tantangan-Tantangan Kearifan Lokal.....	222
➤ Prospek Kearifan Lokal Di Masa Depan.....	226
Daftar Pustaka	228
Profil Penulis & Sinopsis	

